

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari berbagai masalah yang ada di lingkungan sekitar, pencemaran air merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan karena pencemaran air dapat mengganggu lingkungan dan juga kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan air. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.

Mekong merupakan salah satu sungai utama, terpanjang ke-12 di dunia. Sungai ini memiliki wilayah 795.000km^2 dengan volume air ke-10 terbesar didunia (Sukarsa 2011). Sungai Mekong mengalir dari Tibet melalui Tiongkok ke Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sungai Mekong merupakan pembatas kawasan 3 negara yaitu Thailand, Laos dan Myanmar,

sehingga disebut sebagai Golden Triangle. Karena variasi musim yang sangat berbeda dalam aliran dan aliran air yang deras dan air terjun membuat navigasi sangat sulit. dan sungai Mekong ini tidak terlepas dari sejarah bangsa-bangsa terutama di kawasan Asia Tenggara.

Sungai Mekong kaya dengan potensi sumber dayanya dan telah menciptakan masalah yang rumit antara negara-negara riparian. Masalah alokasi atau pengalihan aliran air merupakan masalah utama di aliran sungai Mekong pada akhir tahun 1980an. Thailand memiliki kepentingan untuk mengembangkan wilayah Isaan (wilayah bagian utara Thailand) yang merupakan wilayah tertinggal dan terpencil (Kim 2011, 3) dan untuk menjamin pasokan air ke Bangkok (Schmeier 2009, 35). Thailand pun merancang sebuah proyek irigasi besar di wilayah Isaan dan berinisiatif untuk mentransfer air ke Bangkok. Pejabat bidang perairan Vietnam khawatir dengan rencana Thailand karena pengalihan air pada musim kemarau Sungai Mekong berpotensi merugikan pertanian Vietnam di Delta Mekong (Greg Browder & Leonard Ortolano 2000, 512). Vietnam sangat menentang skema pengalihan Thailand, sebagian karena kecurigaan bahwa pengalihan air tersebut membatasi aliran air Mekong dan akan menghalangi peningkatan Vietnam dalam kompetisi ekspor beras. Laos juga khawatir dengan proyek pengalihan air tersebut karena akan berpotensi menimbulkan masalah ekologi serta mengganggu aktifitas di hilir sungai Mekong, terutama pelayaran yang penting bagi Laos dan secara cepat akan mempengaruhi akses air pada musim kemarau.

Alokasi air selain untuk irigasi, juga untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pembangunan proyek PLTA merupakan aktifitas yang prominen negara-negara riparian Mekong. Selain untuk menghasilkan listrik, PLTA juga merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi. Untuk Laos, salah satu negara termiskin di dunia, aset ekonomi yang paling menjanjikan adalah potensi tenaga air yang cukup besar. Saat ini Laos memiliki sekitar 50 proyek PLTA dalam berbagai tahap perencanaan dan pembangunan. Laos juga membuat kesepakatan untuk menjual pembangkit listrik tenaga air ke Thailand, Vietnam dan Kamboja selama 20 tahun berikutnya. Bagi Kamboja, pertanian merupakan sektor utama ekonomi negara. Selain itu, perikanan adalah juga penting untuk keamanan pangan masyarakat lokal maupun untuk ekspor.

Seperti di Laos, Kamboja juga berencana membangun PLTA. Tujuh belas bendungan telah direncanakan akan dibangun oleh Kamboja, terutama bendungan Sambor, yang dapat menghasilkan antara 500 dan 3.300 MW listrik untuk ekspor ke Thailand dan Vietnam. Vietnam juga memiliki rencana pembangkit listrik di bagian tengah aliran Sungai Mekong (Goh 2001, 475). Thailand juga tertarik dalam mendukung pembangunan fasilitas PLTA di negara tetangga, terutama di Laos dan Tiongkok.

Di Tiongkok, sebagai negara paling hulu sungai Mekong memiliki kebutuhan yang semakin besar terhadap PLTA. Tiongkok telah memulai eksploitasi skala besar dalam pembangunan PLTA sejak tahun 1993. Tujuannya adalah karena peningkatan ekonomi Tiongkok membutuhkan pasokan listrik untuk industri dan investasi. Pemerintah Tiongkok mengembangkan sedikitnya

delapan bendungan, yang mampu menghasilkan listrik untuk pengembangan masa depan ekonomi Yunnan (sebuah provinsi barat daya Tiongkok) dan ekspor listrik terutama Thailand dan Vietnam. (Schmeier 2009, 32)

Keberadaan pembangunan ekonomi antara negara-negara riparian di Sungai Mekong memicu beragam konflik. Masalah alokasi atau pengalihan air merupakan salah satu masalah utama di sungai Mekong. Pengalihan air dari sungai Mekong ke wilayah kekeringan di Thailand utara mendapat banyak pertentangan dari negara riparian lainnya. Pembangunan PLTA di sepanjang sungai Mekong juga telah menimbulkan permasalahan di sungai Mekong. Proyek PLTA yang sedang berlangsung di sepanjang Sungai Mekong menimbulkan kritik besar dari pemerhati lingkungan dan kelompok penekan sebagai bagian dari peningkatan kesadaran sosial dan lingkungan akibat efek buruk bendungan dalam beberapa dekade terakhir.

Pembangunan PLTA telah menimbulkan demonstrasi besar dan penolakan dari orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai. Di Laos, saat pemerintah mencoba membangun bendungan untuk keperluan listrik menimbulkan kritik besar dari warganya karena mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Protes yang berdatangan dari masyarakat atas dampak pengembangan sungai Mekong juga tentang kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Banyak warga khawatir bahwa kompensasi tidak akan cukup untuk menggantikan kehilangan mereka (Souk 2009). Di Thailand, kritikan besar datang dari orang-orang yang terkena dampak dari pembangunan bendungan. Masyarakat Thailand memprotes rencana untuk membangun bendungan di

sepanjang Sungai Mun, anak sungai Mekong, serta kehancuran dari bidang perikanan. Protes juga berdatangan dari masyarakat Vietnam akibat dari adanya pembangunan di sungai Mekong (Tran Dinh Thanh Lam, 2009).

Sungai Mekong telah menimbulkan masalah yang rumit mulai dari keberadaannya dalam berbagi pemanfaatan air dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Ketergantungan tinggi antara negara riparian, pentingnya sungai untuk pembangunan ekonomi sosial mereka, dan munculnya masalah tindakan kolektif di aliran sungai, hal ini sering dianggap menimbulkan konflik antara negara-negara riparian. Karena telah ditunjukkan sebelumnya bahwa dalam aliran sungai Mekong terdapat struktur kepentingan dan strategi yang kompleks.

Manajemen Mekong adalah agenda utama yang harus diambil serius oleh negara-negara riparian untuk mencegah terjadinya konflik. Pada tahun 1995, negara-negara riparian sungai Mekong membentuk "*Mekong River Commission*" (MRC). Membuat perjanjian kerjasama yang disebut "*Agreement on Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin*", antara pemerintah Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Negara anggota MRC bekerja secara bersama-sama dalam cara yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan, pelestarian dan pengelolaan Sungai Mekong dan sumber daya terkait lainnya. Menurut perjanjian tersebut, misi dari MRC adalah: "Untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan manajemen berkelanjutan dalam pembangunan keairan dan yang berkaitan dengan sumberdaya yang dimiliki masing-masing negara untuk bekerjasama secara

menguntungkan demi kesejahteraan hidup rakyat dengan menerapkan program-program strategis, kegiatan-kegiatan dengan menyediakan informasi ilmiah serta saran-saran kebijakan yang diperlukan” (Commision 1995, 1).

Tahun 1996, Tiongkok bersama dengan Myanmar menjadi Mitra Dialog MRC yang diharapkan juga membagi data mereka tentang kondisi dan apa yang dilakukan di sungai Mekong yang masuk wilayah mereka. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan sumber daya perairan yang stabil, bersifat kooperatif dan komprehensif. Wilayah sungai Mekong merupakan hal yang cukup menarik untuk dianalisa, karena sumber daya perairan internasional yang menjadi penunjang kehidupan utama bagi masing-masing negara di sekitarnya merupakan faktor pemicu konflik yang signifikan. Selain itu, proses pelebagaan MRC yang berjalan secara *continue* dan berkelanjutan juga menjadi bukti penting lainnya yang mendukung keberadaan MRC.

MRC membuat sebuah *Strategic Plan* pada tahun 2011-2015 yang mengatur tentang adanya *Integrated Water Resource Management* (IWRM). Dimana *Strategic Plan* 2011-2015 mencerminkan komitmen dan menghadirkan kerangka kerja untuk transisi MRC merinci bagaimana MRC akan mencapai relevansi yang lebih besar melalui operasi yang lebih berkelanjutan dan kepemilikan *stakeholder* yang lebih besar karena mencapai tingkat kematangan baru melalui implementasi fungsi pengelolaan sungai utamanya dan integrasi yang lebih efektif dengan sistem nasional.

Strategi IWRM, disetujui pada bulan Januari 2011, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis ini.

Perkembangan PLTA di Lancang-Mekong memberikan banyak kesempatan, namun juga mengubah konteks pengembangan dan pengelolaan air *Lower Mekong Basin* (LMB) dan sumber daya terkait. Beberapa konsekuensinya akan positif dan yang lainnya berpotensi negatif. Mengatasi hal ini akan membutuhkan kerja sama lebih lanjut dengan Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) dan Uni Myanmar (Myanmar). Telah terjadi kebangkitan kembali minat pada pembangkit listrik tenaga air utama di LMB yang dihasilkan dari sebuah angka faktor yang terkait dengan meningkatnya permintaan energi dan meminimalkan emisi karbon.

Rencana pengembangan irigasi bersamaan dengan berbagai proyek PLTA akan memiliki signifikan efek pada penggunaan dan konsumsi sumber daya Basins. Misalnya, mengintensifkan risiko kekeringan dapat menyebabkan kebangkitan beberapa negara berencana untuk memanfaatkan air dari arus utama Mekong melengkapi pendekatan nasional untuk mitigasi dampak kekeringan. Pertumbuhan pertanian intensif dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk pertanian yang terus meningkat akan menghasilkan permintaan air yang meningkat sementara peningkatan penggunaan pestisida akan terus berlanjut membahayakan kualitas air dan keanekaragaman hayati.

Visi jangka panjang MRC menunjukkan bahwa perannya akan mempromosikan harmonisasi manfaat dibagi di antara negara-negara anggota, memantau kesehatan lingkungan, dan usaha penilaian dampak lingkungan dan sosial, dan, jika diperlukan, penilaian dampak strategis. *Strategic Plan 2011-2015* Komisi Sungai Mekong ini akan menjadi masa transisi menuju implementasi penuh fungsi intinya dan modalitas implementasi yang baru.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip diplomasi lingkungan dalam pengelolaan sungai Mekong?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui problem yang terjadi di Sungai Mekong
2. Memahami prinsip diplomasi lingkungan dalam pengelolaan sungai mekong.
3. Mengetahui capaian utama dari kerjasama negara sekitar Sungai Mekong?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai institusi internasional dalam manajemen sungai internasional yang ada di Asia Tenggara.
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang Sungai Internasional khususnya sungai Mekong yang merupakan sumber penghidupan bagi enam negara yang dilewatinya dan *Mekong River Comission* sebagai institusi yang mengaturnya.
3. Memberikan data dan informasi tentang diplomasi lingkungan dalam pengelolaan sungai mekong.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Jane Ritchie and Jane Lewis 2003, 3). Penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Terkait dengan pertanyaan yang lazim diajukan dalam metode Studi Kasus karena hendak memahami fenomena secara mendalam, bahkan mengeksplorasi dan mengelaborasinya. Menurut Yin (Yin 1994) tidak cukup jika pertanyaan Studi Kasus hanya menanyakan “apa”, (*what*), tetapi juga “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*). Pertanyaan “apa” dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*), “bagaimana” (*how*) untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif (*explanative knowledge*), dan “mengapa” (*why*) untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*). Yin menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji. Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang digunakan untuk memperoleh data.

Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan (*participant observation*), dan dokumentasi. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan ahli

lingkungan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu ahli lingkungan yaitu salah satu Dosen Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Verdinand Robertua S.Sos, M.Soc.Sc, Ibu Yuanike seorang Dosen dari Universitas Papua yang saat ini sedang mengambil gelar Doctor di Institut Pertanian Bogor. Beliau juga salah satu aktivis lingkungan.